

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PROGRAM DESA INKLUSI DI DESA TANETE,**  
**KECAMATAN SIMBANG, KABUPATEN MAROS**

**TRINANDA MAWAHDA**

**E011201087**



**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2024**



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Trinanda Mawahda  
NIM : E011201087  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul : Implementasi Program Desa Inklusi Terhadap Kelompok  
Konstituen Di Desa Tanete, Kecamatan Simbang, Kabupaten  
Maros

Telah diperiksa oleh Pembimbing dandinyatakan sesuai dengan saran Tim  
Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 08 Agustus 2024

Menyetujui  
Pembimbing Tugas Akhir

Mengetahui  
Ketua Departemen Ilmu Administrasi,

Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA, M.Sc.  
NIP 197610232005011001

Prof. Dr. Alwi M.Si  
NIP 196310151989031006



**IMPLEMENTASI PROGRAM DESA INKLUSI DI DESA TANETE KECAMATAN SIMBANG  
KABUPATEN MAROS**

**TRINANDA MAWAHDA  
E011201087**

Skripsi

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik pada tanggal 21 Agustus 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan  
pada

Program Studi Administrasi Publik  
Departemen Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Makassar

Mengesahkan  
Pembimbing Tugas Akhir

Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA  
NIP.197610232005011001

Mengetahui  
Ketua Departemen Ilmu Administrasi,



Prof. Dr. Akwi, M.Si  
NIP.196310151989031006

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Implementasi Program Desa Inklusi di Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Andi Ahmad Yani, S.Sos.,M.Si.,MPA,MSc). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 21 agustus 2024

Yang menyatakan,



Lilinda Mawahda  
E011201087

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia, sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak terwujud. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Andi Ahmad Yani, S.Sos.,M.Si.,MPA sebagai dosen pembimbing, Dr. Amril Hans, S.A.P.,MPA sebagai dosen penguji 1, dan Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si sebagai dosen penguji 2 atas bimbingan dan arahan yang diberikan. Seluruh dosen Departemen Ilmu Administrasi dan seluruh Staff Departemen Ilmu Administrasi, terima kasih atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan dan pelajaran-pelajaran hidup lainnya yang sangat berharga. Kepada Pak Takbir selaku Kepala Desa, seluruh staff desa dan masyarakat Desa Tanete, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, terima kasih atas kesediaan dan bantuan selama penulis melakukan penelitian dan pengambilan data.

Kepada kedua orang tua tercinta, bapak Abdul Haris dan Ibu Irma Yudianita dan Tante saya Ibu Nurlina terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, kerja keras, dan pengorbanannya hingga penulis menyelesaikan pendidikan.

Kepada sahabat tercinta, untuk My Chicago (Anput, Rika, Huzniar, Sukma, Syalom, Yola), 24/7 (Rifdha, Rara, Sukma, Dini), Kiminfi (Ani, Yulis, Syalom, Hendry), Sobat KKN Manjalling (Kiya, Maryam, Hasti, Dika), Sobat PMM Cikini (Wana, Miftah, Desi, Muti, Fazhry, Saad, Ayyub, Fajrul), juga kepada Mustiara Sari, Nurul Hidayah, Ummul Khaeria. Terima kasih sudah membantu, menghibur, menjadi tempat berbagi keluh kesah, dan mendukung penulis selama menjalani pendidikan. Sukses untuk kalian semua.

Kepada Tiara Andini yang telah menjadi idol yang menghibur dan memotivasi penulis selama proses penulisan skripsi melalui lagu dan karya-karyanya. Spesial juga kepada Almh. Wiranda Asike yang telah menemani, menghibur, menjadi tempat curhat, dan banyak membantu selama menjadi mahasiswa meskipun cuman 3 semester. Al-Fatihah utukmu.

Kepada seluruh teman-teman PENA 2020, terima kasih sudah menjadi tempat belajar, melepas penat, berbagi suka duka selama proses perkuliahan. Kepada teman-teman Himpunan HUMANIS FISIP UNHAS, PRISMA FISIP UNHAS, terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran luar biasa yang diciptakan selama kepengurusan dan sudah memberi warna pada dunia perkuliahan. Kepada teman teman PMM 3 UNSRI, terima kasih atas pengalaman dan kenangan manis di akhir masa perkuliahan. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Terakhir, terima kasih juga sebesar-besarnya untuk diri sendiri karena sudah berjuang dan tidak menyerah hingga titik ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Tetap bersyukur dan rendah hati.

Penulis,

Trinanda Mawahda

## ABSTRAK

### **Trinanda Mawahda. Implementasi Program Desa Inklusi di Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros (Dibimbing oleh Andi Ahmad Yani, S.Sos.,M.Si.,MPA)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi program Desa Inklusi di Desa Tanete, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Program ini hadir sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong keterlibatan semua masyarakat dalam proses pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui implementasi program desa inklusi yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana masyarakat Desa Tanete merasakan dampak dari adanya program desa inklusi tersebut. Tiga indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Mengelola proses kebijakan (*managing policy processes*), Mengelola hubungan antar organisasi (*managing inter-organizational relations*), Mengelola hubungan eksternal dan internal (*managing external and internal contacts*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program desa inklusi di desa Tanete, kecamatan Simbang, kabupaten Maros sudah cukup baik. Hal ini didasarkan pada tercapainya indikator program desa inklusi. Terdapat 6 indikator dari 9 indikator yang telah tercapai diantaranya yaitu adanya data disabilitas yang komprehensif dan terupdate, adanya kelompok disabilitas yang setara dengan Lembaga lainnya, keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengambilan kebijakan, perencanaan dan implementasi anggaran yang inklusif disabilitas, adanya regulasi yang mendukung, dan adanya ruang untuk belajar dan berjejaring. Adapun masih terdapat 3 indikator yang belum tercapai, diantaranya yaitu akses pada layanan umum, layanan fisik yang aksesibel, dan adanya fasilitas sosial masyarakat pada penyandang disabilitas. Hal tersebut dikarenakan masih dalam tahap implementasi dan masih terbatasnya anggaran desa.

**Kata Kunci : Implementasi; Desa Inklusi; Desa Tanete.**

## **ABSTRACT**

**Trinanda Mawahda. Implementation of the Inclusive Village Program in Tanete Village, Simbang District, Maros Regency. (Supervised by Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA**

This research aims to determine the extent of the success of the Inclusive Village program implementation in Tanete Village, Simbang District, Maros Regency. This program is introduced as a government effort to reduce social disparities and encourage the involvement of all community members in the village development process. This research was conducted to understand the implementation of the inclusive village program carried out by the government and how the community of Tanete Village feels the impact of this inclusive village program. Three indicators used in this research were Managing policy processes, Managing inter-organizational relations, and Managing external and internal relations. (managing external and internal contacts). In this study, the author employs a descriptive qualitative approach with a case study design. The data collection techniques used were observation, interviews, and document studies. The results of this research indicate that the inclusive village program in Tanete village, Simbang district, Maros regency is quite good. This is based on the achievement of the inclusive village program indicators. There are 6 out of 9 indicators that have been achieved, including the existence of comprehensive and updated disability data, the presence of disability groups that are on par with other institutions, the involvement of persons with disabilities in policy-making, inclusive budgeting planning and implementation, the existence of supportive regulations, and the availability of spaces for learning and networking. However, there are still 3 indicators that have not been achieved, namely access to public services, accessible physical services, and the availability of social facilities for persons with disabilities. This is due to the fact that it is still in the implementation stage and the limited village budget.

**Keywords: Implementation; Inclusive Village; Tanete Village.**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Tinjauan Teori .....	4
I.3 Rumusan Masalah.....	9
I.4 Tujuan Penelitian .....	9
I.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II METODE PENELITIAN.....	11
II. 1. Pendekatan Penelitian.....	11
II. 2. Desain Penelitian.....	11
II. 3. Prosedur .....	11
II.4. Validitas dan Realibitas Data .....	13
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	15
III.1 Deskripsi Lokasi penelitian .....	15
III.2 Mengelola proses kebijakan (managing policy processes).....	18
III. 2 Mengelola hubungan antar organisasi (managing inter-organizational relations) .....	22
III. 3 Mengelola hubungan eksternal dan internal (managing external and internal contacts .....	29
BAB IV PENUTUP .....	37
IV. 1 Kesimpulan.....	37

IV. 2 Saran .....	38
DAFTAR PUSTAKA .....	39
LAMPIRAN .....	3942

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar I.1 Sebaran Penyandang Disabilitas di Indonesia .....	3
--	---

Gambar I.2 Kerangka Pikir.....	9
Gambar III.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin & Dusun di Desa Tanete Tahun 2022 .....	15
Gambar III.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Kepala Keluarga Dusun di Desa Tanete Tahun 2022 .....	16
Gambar III.3 Jumlah Penduduk Desa Tanete Tahun 2022.....	16
Gambar III.4 Kursus Menjahit Kelompok Perempuan .....	19
Gambar III.5 Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa Inklusif .....	20
Gambar III.6 Jumlah BIMTEK Peningkatan Kapasitas.....	24
Gambar III.7 Indikator Pencapaian .....	28
Gambar III.8 Musyawarah Khusus Forum Anak, Perempuan, dan Penyandang Disabilitas .....	31
Gambar III.9 Penguatan Kelompok Konstituen .....	33
Gambar III.10 Data Pemberian Bantuan Alat Disabilitas.....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Informan Penelitian .....	11
--------------------------------------	----

Tabel III.1 Struktur Pemerintah Desa ..... 26

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Biodata Penulis ..... 43

Lampiran 2. Logbook Penelitian.....	44
Lampiran 3. Surat Izin Meneliti.....	48
3. 1 Surat Izin Meneliti dari Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Hasanuddin .....	48
3. 2 Surat Keterangan Izin Melakukan Penelitian dari DPMTSP Sulawesi Selatan ...	49
3. 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Pemerintah Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros .....	50
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian .....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Konsep pemerintahan yang inklusi merupakan istilah yang lebih umum digunakan. Tentunya disebabkan karena kebijakan dan program pemerintah akan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat bukan hanya para pemangku jabatan. Oleh karena itu, pemerintahan inklusi harus diterapkan disetiap hierarki pemerintahan, termasuk ditingkat desa. Dimana desa adalah bagian terkecil dalam pemerintahan yang mana memungkinkan implementasi yang lebih cepat.

Widjaja (2008 : 3) dalam Latif & Mustanir (2019) mengemukakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, Bintarto (2009) berpendapat bahwa desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah.

Pengertian desa dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Tentunya pembangunan desa sebagai lokus pembangunan yang tidak luput dari perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang - Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 juga telah menetapkan peraturan Alokasi Dana Desa (ADD). Ini menetapkan bahwa 70% dari ADD total dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan 30% dari sisa ADD dialokasikan untuk pemberdayaan. Salah satu faktor pembangunan desa yang baik adalah bagaimana kemudian setiap elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif tanpa terkecuali. Masyarakat perlu dilibatkan mulai dari proses perencanaan hingga pada proses evaluasi.

Konsep pembangunan desa bisa diwujudkan dengan mencetuskan berbagai kegiatan atau program dalam mendukung kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan keterlibatan dari masyarakat itu sendiri. Disinilah peran dari pemerintah desa yang berintegrasi dengan sistem pemerintahan di atasnya dalam membuat sebuah program. Program adalah bagian dari rangkaian kegiatan yang terdiri dari langkah-

langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan komponen pertama yang diperlukan untuk mencapai suatu implementasi. Adanya kelompok masyarakat adalah komponen kedua yang harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan program. Program bertujuan untuk melibatkan masyarakat dan memberikan hasil program yang sedang berjalan untuk mengubah atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Program akan gagal atau tidak efektif jika tidak menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

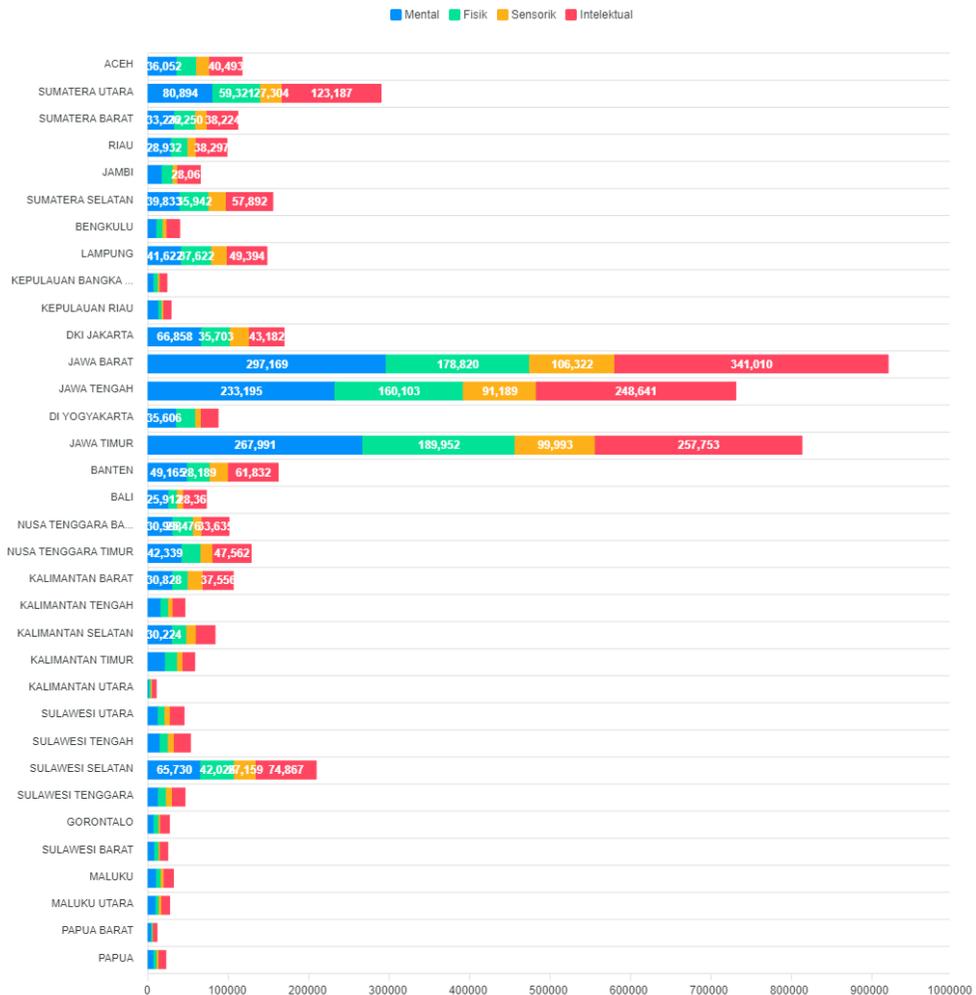
Salah satu program yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa yang juga mulai banyak diterapkan adalah program desa inklusi. Program desa inklusi merupakan program yang mulai banyak diterapkan dan cukup membantu pemerintah desa dalam membangun desanya. Dilansir dari Website Pemerintah Desa Bhuana Jaya Kab. Kutai Kartanegara (2023) mengatakan bahwa desa inklusi merupakan sebuah konsep pembangunan desa yang bertujuan untuk mendorong keberagaman dan keterlibatan sosial di antara semuaarganya. Ini adalah pendekatan yang inklusif untuk pemukiman dan pengembangan masyarakat, di mana semua orang, terlepas dari latar belakang mereka, dihargai dan dihormati.

Dilansir dari website potensi desa (2023), program desa inklusi merupakan program pemerintah yang diterapkan diseluruh Indonesia sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong keterlibatan semua masyarakat dalam proses pembangunan desa. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan dukungan baik berupa anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana lainnya sebagai upaya memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program perencanaan dan pembangunan desa.

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras mengemukakan bahwa Desa inklusif adalah kondisi kehidupan Desa yang setiaparganya bersedia secara sukarela untuk membuka ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga Desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan. Pembentukan dan pengembangan desa inklusif tidak hanya berupa penyediaan layanan dasar, tetapi juga peningkatan kualitas layanan dasar maupun peningkatan partisipasi kelompok marginal dan rentan dalam penyelenggaraan Desa. Kelompok marginal dan rentan meliputi: warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, kelompok minoritas serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Program desa inklusi ini hadir karena kesadaran dari para pemangku kebijakan bahwa keterlibatan setiap elemen masyarakat bisa menjadi faktor penting dalam pembangunan sebuah desa. Seperti halnya kaum disabilitas yang kerap kali dianggap sebagai kelompok yang memiliki berbagai keterbatasan dan dianggap tidak mampu mandiri karena memerlukan bantuan orang lain.

**Gambar I.1. Sebaran Penyandang Disabilitas di Indonesia Kategori Sedang dan Berat**



Sumber : Susenas 2021 (BPS, 2022)

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 (BPS, 2022), penduduk disabilitas diperkirakan berjumlah sekitar 6,2 juta jiwa. Data tersebut menunjukkan banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yang perlu diberikan kesempatan dan kesamaan hak dalam berbagai akses layanan pemerintahan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Berdasarkan data di atas terdapat 189.784 ribu penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan (Sul-Sel). Data ini lebih lanjut menunjukkan bahwa Sul-Sel menjadi provinsi terbanyak kelima dalam penyebaran disabilitas yang ada di Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berupaya memberikan perhatian dan perbaikan layanan terhadap penyandang disabilitas. Salah satunya yaitu, mengadakan

konsultasi publik terkait Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan untuk menyiapkan rencana aksi terhadap penyandang disabilitas untuk mendorong kebijakan dan program pendukung layanan yang inklusi.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diterangkan pada pasal 8 ayat 1B yang menyatakan bahwa “masyarakat desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil”. Oleh karena itu, program desa inklusi hadir untuk melaksanakan amanat dari undang - undang tersebut. Tak hanya itu, urgensi hadirnya desa inklusi ini merupakan hal dasar dalam mewujudkan hak - hak masyarakat sebagai makhluk yang bermartabat untuk memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama. Menteri Sosial menyatakan bahwa rintisan desa inklusi merupakan “virus yang positif” dan perlu didukung melalui dana desa untuk membangun desa inklusi secara fisik (Rappler.com, 2016).

Kemunculan Undang - undang Desa membuat pemerintah desa memiliki otoritas penuh dalam menjalankan urusan rumah tangga, tetapi tidak ada otoritas tanpa tanggung jawab. Pemerintah desa harus menyelesaikan masalah sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungannya. Masalah desa yang berkaitan dengan difabel, usia rentan dan kelompok minoritas. Studi yang dilakukan Hadi (2021) dilansir website Ombudsman Republik Indonesia (RI) menjelaskan bahwa banyak hak difabel masih belum terpenuhi oleh pemerintah baik dalam proses pembangunan maupun dalam mendapatkan layanan yang ada.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menghadirkan sebuah program untuk mendukung pembangunan desa dan mengakomodir keterlibatan setiap elemen masyarakat yang ada di desa. Salah satunya yang ada di Kabupaten Maros yaitu program desa inklusi. Melansir dari website pemerintah kabupaten maros (2023) Bupati Maros mengatakan bahwa terdapat 12 desa yang dijadikan pilot project desa inklusi yaitu Mangeloreng, Simbang, Tanete, Minasa Baji, Baruga, Samangki, Damai, dan Toddopulia, Lekopacing, Borimasunggu, Mattirotasi, Borikamase. Adapun peneliti memilih Desa Tanete sebagai Lokasi penelitian, dikarenakan akses lokasi yang mudah dijangkau (dekat dengan kota) dan keterbukaan perangkat desa tersebut.

Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan di Kantor Desa Tanete, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, masih terdapat beberapa faktor dan hambatan dalam mengimplementasikan program desa inklusi, diantaranya yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dan anggaran yang masih terbatas dalam menunjang program desa inklusi. Oleh karena itu, perlunya upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut demi keberhasilan program desa inklusi. Dari berbagai masalah tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi program Desa Inklusi di Desa Tanete, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros

## **1.2 Tinjauan Teori**

Beberapa penelitian terdahulu terkait desa inklusi, diantaranya Widyahseni & Prima (2020) mengkaji tentang inklusi sosial dalam pembangunan desa di Desa

Tempuran, Kecamatan Sawo, Kabupaten Trenggalek. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan data lapangan inklusi sosial yang dijalankan dalam pembangunan Desa Tempuran adalah kebijakan pembangunan membawa masyarakat untuk inklusi (terlibat) dalam pembangunan desa yang mengarah pada pemenuhan hak masyarakat, ekonomi masyarakat, kepartisipasian masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, namun terkendala oleh kelambatan rekonstruksi sarana dan prasarana serta tidak ada pembaharuan atau inovasi yang dikembangkan dalam komoditas home industry (Industri Rumah) masyarakatnya, hal tersebut berimbas pada tidak maksimalnya capaian inklusi sosial dalam pembangunan desa yang dilakukan masyarakat Desa Tempuran.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah teori yang digunakan, lokasi penelitian, dan subjek penelitian. Penelitian terdahulu lebih banyak terfokus kepada masyarakat desa sedangkan penelitian sekarang lebih kepada pemerintah desa dan organisasi yang terlibat, meskipun masyarakat juga dilibatkan tetapi tidak terlalu banyak.

Muryaningsih & Ratna (2021) mengkaji tentang penerimaan masyarakat kepada penyandang disabilitas (studi desa inklusi peduli dengan kelompok rentan di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kalurahan Sidorejo telah memberikan ruang gerak/akses untuk penyandang disabilitas dalam bermasyarakat. Kecuali penyandang disabilitas berat yang tidak bisa melakukan aktifitas. Tetapi melalui keluarganya juga dapat ikut ambil bagian dalam pengembangan keterampilan. Di Kalurahan Sidorejo telah memiliki forum penyandang disabilitas yang bertujuan untuk menampung aspirasi penyandang disabilitas.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah lokasi penelitian, teori yang digunakan dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap penyandang disabilitas sedangkan penelitian sekarang bukan hanya penyandang disabilitas tetapi secara umum yang berkaitan dengan desa inklusi.

Dinata et al. (2022) mengkaji tentang tata kelola desa inklusi di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tata kelola desa inklusi melibatkan multi pihak dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu untuk program kegiatan bengkel alat bantu disabilitas memberikan dampak positif (membuka lapangan pekerjaan baru), walaupun terdapat kendala teknis dalam pelaksanaannya seperti kurangnya daya listrik pada bengkel. Jalannya desa inklusi di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ini namun mengalami hambatan teknis seperti kurangnya infrastruktur yang ramah terhadap masyarakat penyandang disabilitas dalam menjalani aktivitas.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah teori yang digunakan, lokasi penelitian, dan pihak yang dilibatkan. Penelitian terdahulu melibatkan multi pihak atau multi aktor dengan adanya kolaborasi dengan pihak lain, dimana pemerintah desa bukan sebagai penyelenggara utama tetapi ada organisasi lain yakni Linksos. Sedangkan penelitian sekarang pemerintah desa sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan desa inklusi.

Pada dasarnya terdapat berbagai teori dalam implementasi kebijakan. Misalnya konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III (1980) bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi

(*communication*), sumber daya (*resources*), sikap pelaksana (*rispotition or attitudes*), dan struktur birokrasi (*structure bureaucratic*).

#### 1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi, diantaranya yaitu 1). Transformasi informasi dimensi, yang menghendaki agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak yang berkepentingan, 2). Dimensi kejelasan, yang menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran dan substansi dari kebijakan public tersebut, 3). Dimensi konsisten, yang diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup, dan pihak berkepentingan.

#### 2. Sumber daya (*resources*)

Sumber daya yang berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan.

#### 3. Sikap pelaksana (*rispotition or attitudes*)

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

#### 4. Struktur birokrasi (*structure bureaucratic*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standard Operation Procedur* ( SOP ). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Konsep implementasi kebijakan juga dikemukakan oleh Grindle (1980) Syang mengatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi didasarkan pada dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implemmentation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan

implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Selain itu, terdapat juga konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Winter (2004), dimana ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu

1. Perilaku hubungan antar organisasi (*organizational and interorganizational implementation behavior*), dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi.
2. Perilaku aparat/birokrat tingkat bawah (*street – level bureaucratic behavior*), dimensinya adalah kontrol politik, kontrol organisasi, dan etos kerja norma - norma profesional.
3. Perilaku kelompok sasaran (*target group behavior*), perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.

Selanjutnya Hill dan—Hupe (2002) mengemukakan konsep implementasi kebijakan dari perspektif preskriptif. Ketiga perspektif tersebut diantaranya mengelola proses kebijakan (*managing policy processes*), mengelola hubungan antar organisasi (*managing inter-organizational relations*) dan mengelola hubungan eksternal dan internal (*managing external and internal contacts*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep Hill dan Hupe (2002) dalam menganalisis masalah implementasi kebijakan program desa inklusi di Desa Tanete. Alasan penulis menggunakan konsep ini karena relevan untuk menganalisis kasus implementasi pembangunan desa inklusi di Desa Tanete, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

Ada pun tiga perspektif yang dikemukakan oleh Hill dan—Hupe (2002) adalah sebagai berikut :

### 1. **Mengelola proses kebijakan (*managing policy processes*)**

Merupakan faktor yang menilai dalam pengelolaan proses kebijakan sehingga pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Mengelola proses kebijakan ditentukan oleh kejelasan penyusunan tanggung jawab dalam pelaksanaannya sehingga kebijakan yang akan diimplementasikan akan tercapai sesuai tujuan yang telah ditetapkan

Dalam aspek ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemerintah atau perangkat desa selalu pelaksana kebijakan memahami terkait program desa inklusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 2. **Mengelola hubungan antar organisasi (*managing inter-organizational relations*)**

Merupakan faktor yang dibuat untuk menciptakan kejelasan tugas dan kompetensi, menjaga sumber daya yang cukup, meningkatkan kepatuhan kontrak, dan mewujudkan pelaksanaan kemitraan. Dalam aspek kejelasan tugas dan kompetensi, peneliti ingin mengetahui bagaimana pembagian tugas pelaksana kebijakan (implementator) dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan baik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

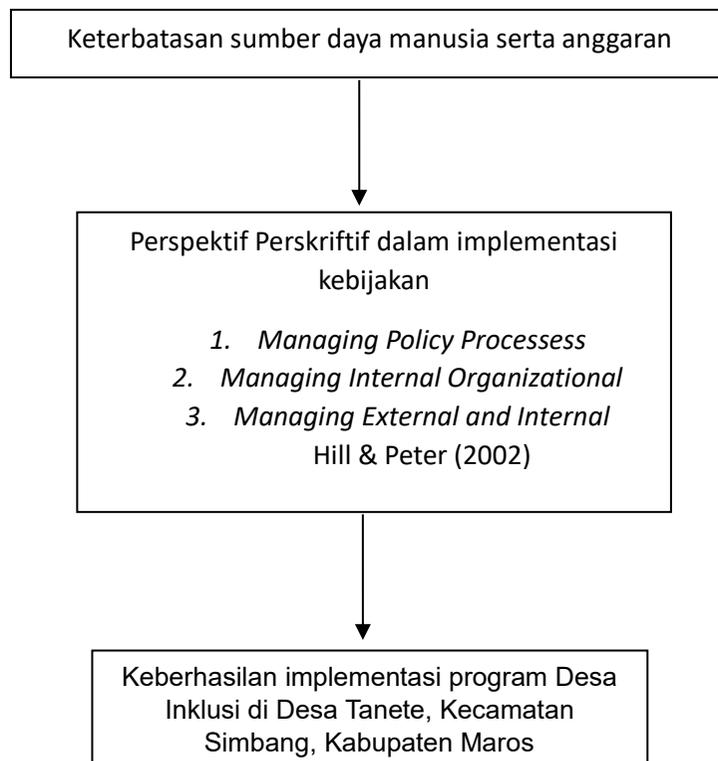
Dalam aspek sumber daya terdiri atas sumber daya manusia dan prasarana yang digunakan, peneliti ingin mengetahui bagaimana sumber daya manusia apakah telah memadai atau belum dan fasilitas apa saja yang digunakan dalam menunjang keberhasilan program tersebut. Dalam aspek kepatuhan kontrak, peneliti ingin mengetahui siapa saja yang terlibat dalam menjalankan program tersebut sesuai dengan tupoksi masing - masing . Dalam aspek pelaksanaan kemitraan, peneliti ingin mengetahui mitra yang bekerja sama dalam pelaksanaan program desa inklusi.

### **3. Mengelola hubungan eksternal dan internal (*managing external and internal contacts*)**

Terdiri atas peningkatan kordinasi antar Lembaga, mewujudkan standar operasional prosedur (SOP), dan pelatihan kualitas sumber daya manusia. Dalam aspek peningkatan kordinasi antar lembaga/organisasi, peneliti ingin mengetahui bagaimana hubungan internal para pelaksana kebijakan di Desa Tanete dan hubungan dengan desa lain yang bekerja sama dalam program desa inklusi. Dalam aspek pelatihan, penelitian ingin mengetahui bagaimana pelatihan yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi menunjang keberhasilan implementasi program desa inklusi.

1. Mengelola proses kebijakan (*managing policy processes*)
  - a. *Input* : Membuat tanggung jawab yang jelas
  - b. *Output* : Membuat *Interfaces*
  - c. *Outcome*: Membuat kebijaksanaan yang jelas dan tertulis
  
2. Mengelola hubungan antar organisasi (*managing inter-organizational relations*)
  - a. *Input* :
    - Menciptakan kejelasan tugas dan kompetensi
    - Menjaga sumber daya yang cukup
  - b. *Output* : Meningkatkan kepatuhan terhadap kontrak
  - c. *Outcome* : Mewujudkan kemitraan
  
3. Mengelola hubungan eksternal dan internal (*managing external and internal contacts*)
  - a. *Input* :
    - Meningkatkan hubungan antar Lembaga
    - Mewujudkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
    - Pelatihan kualitas sumber daya manusia
  - b. *Output* : Meningkatkan dan mempertahankan orientasi layanan
  - c. *Outcome* : Meningkatkan pemberian layanan yang terkoordinasi

Gambar I. 2 Kerangka Pikir



### I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini ialah “Bagaimana implementasi program Desa Inklusi di Desa Tanete, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros?”

### I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi program Desa Inklusi di Desa Tanete, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros

### I.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah :

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait teori implementasi yang ada dalam penelitian ini dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terkait desa inklusi yang bisa dijadikan sebagai literatur bagi penelitian selanjutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan khususnya kepada para aparat pemerintah terkait penerapan program desa khususnya program Pembangunan desa inklusi di kabupaten Maros

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### II. 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu atau kelompok. Proses penelitian ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, data yang biasanya dikumpulkan dalam setting partisipan, analisis data yang secara induktif dibangun dari tema yang khusus ke tema yang umum, dan peneliti membuat interpretasi terhadap makna data.

#### II. 2. Desain Penelitian

Creswell (2018) menjelaskan beberapa pendekatan kualitatif diantaranya yaitu penelitian kualitatif studi kasus, penelitian fenomenologi, penelitian grounded, penelitian theory, dan penelitian etnografi. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif studi kasus. Studi kasus merupakan desain penyelidikan yang ditemukan di banyak bidang khususnya evaluasi, Dimana peneliti mengembangkan analisis yang mendalam terhadap suatu kasus, yang diantaranya berupa program, peristiwa, aktivitas, proses satu atau lebih individu.

Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi terperinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan. Kemudian, penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Artinya, data yang diperoleh akan dilaporkan dalam bentuk narasi atau gambar dengan tujuan untuk menjelaskan realitas yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan adanya penelusuran dengan menggunakan teori yang bisa mengembangkan pemahaman mengenai kasus yang dialami. Alasan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus ialah karena dianggap dapat menjadi parameter untuk memberikan gambaran secara detail terkait suatu peristiwa atau fenomena.

#### II. 3. Prosedur

##### a. Informan Penelitian

Informan dalam peneliti ini ialah orang – orang yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang dapat diolah dengan lebih akurat. Adapun informan dalam penelitian yaitu :

**Tabel II.1 Informan Penelitian**

Pemerintah Desa	Masyarakat	Kemitraan
5 orang (Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Ketua Kelompok Konstituen, Pendamping Desa)	3 Orang (1 orang penyandang disabilitas, 2 orang masyarakat biasa)	1 Orang (Yayasan Bakti)

## **b. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Creswell (2014) mengemukakan tiga teknik utama dalam pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif yakni wawancara mendalam, partisipan observer dan telaah dokumen. Berikut penjelasannya :

### **1. Wawancara**

Sugiyono (2021) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Dalam proses wawancara, peneliti akan bertemu secara langsung dengan para aktor yang terlibat sebagai informan untuk menanyakan hal-hal yang kemudian dianggap penting dalam mendukung kegiatan pengambilan data dari peneliti. Adapun hal-hal yang kemudian akan ditanyakan nantinya akan disesuaikan dengan indikator dari teori yang dipakai. Kemudian aktor yang nantinya akan diwawancarai masih mencakup pemerintah desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, BPD dan organisasi lain jika diperlukan.

### **2. Observasi**

Sugiyono (2021) menyatakan bahwa observasi merupakan cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, rutinitas dan pola interaksi kehidupan sehari - hari mereka. Observasi dianggap sebagai teknik pengumpulan data yang paling efektif karena observasi dapat terjun langsung ke tempat yang ingin diteliti sehingga peneliti dapat mendengar, merasakan, melihat secara langsung keadaan dan situasi yang ada di lokasi, dalam hal ini di Desa Tanete, Kabupaten Maros.

### **3. Studi Dokumen**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, gambar, maupun elektronik dengan tujuan untuk merekam seluruh rangkaian kegiatan selama melaksanakan pelaksanaan penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, sehingga hasil penelitian dapat lebih dipercaya karena adanya pendukung oleh dokumen-dokumen dari narasumber.

## **C. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12 – 14) ada tiga tahapan dalam teknik analisis data. Berikut penjelasannya :

### **1. Kondensasi data (*data conversation*)**

Merupakan komponen yang merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data yang

mewakili hampir keseluruhan catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi. Proses kondensasi data ini dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara lapangan dan memperoleh data tertulis yang kemudian Transkrip wawancara tersebut dikategorikan atau dipilah untuk memperoleh fokus penelitian yang dibutuhkan peneliti.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data adalah pengorganisasian, penyatuan dan kesimpulan organisasi. Penyajian data juga membantu memahami konteks penelitian ketika melakukan analisis lebih dalam. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami seluruh data dan informasi yang diperoleh.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusions drawing*)

Setelah proses analisis data selesai dilakukan, penarikan kesimpulan dilakukan untuk memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah diangkat dalam penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian yang dilakukan dan didukung dengan bukti valid dan kredibel. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan harus disampaikan dengan jelas melalui narasi yang terstruktur dan dapat membantu peneliti untuk mendeskripsikan temuan hasil penelitiannya

#### II.4. Validitas dan Realibilitas Data

Gibbs dalam Creswell (2018) berpendapat bahwa validitas kualitatif berarti peneliti memeriksa keakuratan temuan dengan menggunakan prosedur tertentu, sedangkan realibilitas kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan peneliti konsisten pada peneliti yang berbeda dan proyek yang berbeda.

- Mendefinisikan validitas kualitatif

Creswell & Miller dalam Creswell (2018) mengemukakan bahwa validitas adalah salah satu kekuatan penelitian kualitatif dan didasarkan pada penentuan apakah temuannya akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca suatu laporan. Banyak istilah dalam literatur kualitatif yang membahas validitas, seperti kepercayaan, keaslian, dan kredibilitas dan ini merupakan topik yang banyak dibahas.

- Menggunakan beberapa prosedur validitas

Perspektif prosedural yang direkomendasikan satu atau lebih strategi yang tersedia untuk memeriksa keakuratan temuan. Peneliti harus secara aktif memasukkan strategi validitas ke dalam proposal dengan penggunaan berbagai pendekatan, yang akan meningkatkan kemampuan peneliti untuk menilai keakuratan temuan serta meyakinkan pembaca akan keakuratan tersebut.

- Menggunakan keandalan kualitatif

Bagaimana peneliti kualitatif memeriksa apakah pendekatan mereka dapat diandalkan (konsisten atau stabil), Yin dalam Creswell (2018)

menyarankan agar peneliti kualitatif perlu mendokumentasikan prosedur studi kasus mereka dan mendokumentasikan sebanyak mungkin langkah dalam prosedur tersebut. Beliau juga merekomendasikan untuk menyiapkan protokol dan *database* studi kasus yang terperinci, sehingga orang lain dapat mengikuti prosedurnya.

- Generalisasi kualitatif

Gibbs dalam Creswell (2018) mengemukakan bahwa generalisasi kualitatif adalah istilah yang digunakan secara terbatas dalam penelitian kualitatif, karena maksud dari bentuk penyelidikan ini bukanlah untuk menggeneralisasi temuan pada individu, Lokasi atau tempat di luar yang diteliti.